

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS BALAI PELAYANAN  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
(BP3TKI) DIKOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Skripsi Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru*



**BIMO SETYA REHASMAN  
NPM: 167110117**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

NAMA : BIMO SETYA REHASMAN  
NPM : 167110117  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
JENJANG PENDIDIKAN : SASTRA SATU (SI)  
JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Penempatan Dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan subbab dalam skripsi ini, telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setuju untuk diuji dalam sidang komprehensif.

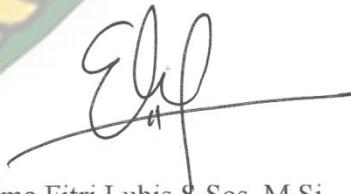
Pekanbaru, 17 Januari 2022

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Pembimbing

  
Lilis Suryani, S. Sos, M.Si

  
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

NAMA : BIMO SETYA REHASMAN  
NPM : 167110117  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
JENJANG PENDIDIKAN : SASTRA SATU (S1)  
JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Penempatan Dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji ujian komferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana :

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Ketua,



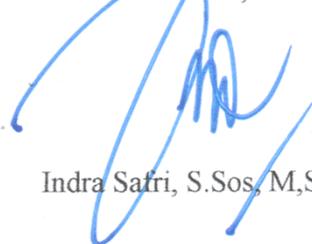
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Wakil dekan I,



Indra Safri, S.Sos, M,Si

Anggota,



Drs, Parjiayan, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : BIMO SETYA REHASMAN  
NPM : 167110117  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
JENJANG PENDIDIKAN : SASTRA SATU (S1)  
JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Penempatan Dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota  
Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dimulai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah :

Pekanbaru, 17 Januari 2022

An. Tim Penguji

Ketua,

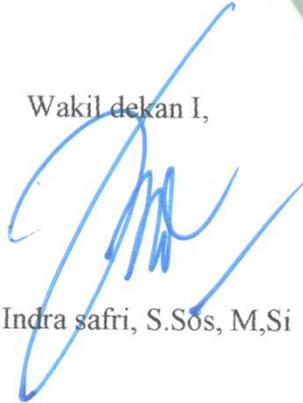
  
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Sekretaris,

  
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut menyetujui,

Wakil dekan I,

  
Indra safri, S.Sos, M,Si

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Ketua

  
Lilis Sutrisni, S.Sos, M.Si

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru”**.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan petunjuk kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankan penulis menyampaika ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Kaprodi Administrasi Publik, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan penulisan usulan penelitian ini.
4. Ibu Ema Fitri Lubis, , S. Sos., M. Si selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan saran dan nasehat kepada penulis
5. Selama proses bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan usulan penelitian. Semoga ketulusan dan keikhlasan ibu mendapat kerbekahan dari Allah SWT.
6. Seluruh Dosen Administrasi Publik yang telah mendidik dan memfasilitasi kebutuhan akademik, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan.
7. Seluruh Staf Karyawan TU Fisipol yang telah membanu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Ibunda tercinta yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, dan selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
9. Segenap pegawai dan karyawan Kantor Balai BP3TKI di Pekanbaru yang telah memberikan informasi baik melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan usulan penelitian ini.

10. Kepada teman-teman angkatan dan seperjuangan Administrasi Publik 2016 yang telah membantu dan memberikan masukan terhadap permasalahan dalam pembuatan skripsi ini, serta selalu menyemangati, menemani dan memberikan masukan terhadap pembuatan usulan penelitian ini, sehingga dapat terselesaikan.

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini dapat menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Harap penulis semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Agustus 2021

Penulis

**Bimo Setya Rehasman**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN HASIL REVISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABTRACK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
1. Tujuan Penelitian .....	21
2. Kegunaan Penelitian.....	21
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Administrasi.....	23
2. Konsep Organisasi .....	26
3. Konsep Manajemen.....	29
4. Konsep Evaluasi.....	30

5. Konsep Pelaksanaan.....	32
6. Konsep Pelindungan Tenaga Kerja.....	34
B. Kerangka Pikir .....	36
C. Hipotesis.....	37
D. Konsep Operasional .....	37
E. Operasionalisasi Variabel.....	39
F. Teknik Pengukuran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi Dan Sampel .....	43
D. Teknik Penarikan Sampel .....	45
E. Jenis Dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Terbentuknya Kota Pekanbaru.....	48
B. Luas Wilayah dan Kependudukan .....	49
C. Pelaksanaan Tugas BP3TKI Dikota Pekanbaru.....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden Penelitian .....	53
B. Hasil dan Pembahasan.....	55
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas BP3TKI.....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan ..... 72  
B. Saran..... 73  
**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 75**  
**DAFTAR LAMPIRAN ..... 78**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Di Kota Pekanbaru.....	39
III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas BP3TKI.....	44
V.1 : Responden hasil Penelitian.....	53
V.2 : Distribusi jumlah Responden berdasarkan Tingkat umur .....	54
V.3: Distribusi Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan ( Calon Tenaga Kerja Indonesia.....	55
V.4 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Input (Dinas) .....	56
V.5: Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Input (Calon Tenaga Kerja Indonesia) .....	58
V.6 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Proses (Dinas) .....	60

V.7:	Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Proses (Calon Tenaga Kerja Indonesia) .....	62
V.8 :	Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Output (Dinas).	64
V.9 :	Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Output (Calon Tenaga Kerja Indonesia) .....	65
V.10 :	Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Outcome (Dinas) .....	67
V.11 :	Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Outcome (Calon Tenaga Kerja Indonesia) .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur Organisasi Pelayanan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Di Kota Pekanbaru .....	6
I.II : Data Tenaga Kerja Internasional.....	20
II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Balai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Pegawai Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di kota Pekanbaru .....	80
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kota Pekanbaru .....	88
3. Daftar Kuisisioner Pegawai Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di kota Pekanbaru .....	92
4. Daftar Telly Penelitian .....	99
5. Dokumentasi Penelitian .....	101

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Bimo Setya Rehasman  
NPM : 167110117  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru.

Berdasarkan naskah yang didaftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri berdasarkan hasil pemikiran dan pemaparan saya sendiri dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya tulis.
2. Keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya ini adalah benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian sempro yang telah saya ikuti beserta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta hukum di Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Yang menyatakan

Bimo Setya Rehasman

# EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) DI KOTA PEKANBARU

Oleh

**BIMO SETYA REHASMAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) terkhusus dalam bidang atau terfokus pada kegiatan penyaluran dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan kata-kata atau narasi berdasarkan hasil yang di peroleh dilapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru untuk indikator Input, Output, Proses, Outcome berada pada kategori Baik. Dalam proses penyaluran dan penempatan calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri terdapat beberapa hambatan di dalam proses kegiatan dari pendataan hingga ke penempatan tenaga kerja Indonesia. Jadi, Balai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) kota Pekanbaru perlu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas nya agar tercapai kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**Kata kunci: Evaluasi, Pelaksanaan ,Tugas BP3TKI**

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE TASK FOR THE  
PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN LABOR SERVICES  
(BP3TKI) IN PEKANBARU CITY**

**By**

**BIMO SETYA REHASMAN**

*This study aims to find out how the implementation of the tasks of the Indonesian Migrant Worker Placement and Protection Service Center (BP3TKI) specifically in the field or focused on the distribution and placement of Indonesian Migrant Workers. To achieve the objectives of this study, the researchers used quantitative methods, namely explaining the results of the study in words or narratives based on the results obtained in the field. The results of the research conducted indicate that based on the Implementation of the Tasks for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BP3TKI) in Pekanbaru City, the Input, Output, Process, Outcome indicators are in the Good category. In the process of distributing and placing prospective Indonesian workers abroad, there are several obstacles in the activity process from data collection to the placement of Indonesian workers. So, the Indonesian Migrant Worker Placement Center (BP3TKI) Pekanbaru city needs to improve performance in carrying out its duties in order to achieve the welfare of Indonesian Workers Abroad.*

**Keywords: Evaluation, Implementation, Tasks of BP3TKI**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program peningkatan fasilitas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada septempber 2019 sebesar 9,22%. Angka tersebut lebih rendah 0,19% disbanding periode Maret 2019. Dari hasil surveinya angka kemiskinan tercatat 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang. Penurunan dapat dilihat dari angka kemiskinan yang tercatat di Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 0,19%. Meski turun di Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan terkait tingkat kemiskinan diperdesaan dan perkotaan yang masih tampak jelas.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia cenderung menurun. Namun pada tahun 2020, angka pengangguran kembali meningkat 60.000 orang. Dari 6,82 juta orang pada 2019 menjadi 6,88 juta orang setahun setelahnya. Jumlah angkatan kerja pada 2020 juga bertambah

menjadi 137,91 juta orang, sebanyak 131,03 juta orang diantaranya bekerja. Lapangan pekerjaan yang menurun berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lainnya.

Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan dengan melibatkan Instansi terkait baik di Pusat maupun daerah. Hal ini sejalandengan agenda pembangunan nasional yang di tandai dengan negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam kontekstenaga kerja luar negeri.

Namun demikian, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tidak luput dari sejumlah permasalahan tenaga kerja seperti pemerasan, penipuan, dan kasus-kasus pemberangkatan PMI (Pekerja Mgran Indonesia) ilegal. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK) hadir sebagai badan penyelenggara penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah yang mengemban amanah Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordininasi dan terintegrasi beersama-sama dengan instansi terkait.

BP3TKI Pekanbaru adalah merupakan unit kerja BNP2TKI dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi warga negara yang bekerja

sesuai dengan peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia.

UU No 23 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah”. Pemerintah daerah merupakan sebuah organisasi. Menurut Gulick (dalam Safiie, 2005;53) Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

Manajemen kerja yang baik dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara mensejahterakan bawahan dan pegawai, dalam hal ini organisasi memiliki ugas dalam pembagian pemerataan jumlah pegawai atau tenaga kerja agar dalam sebuah organisasi tidak terlalu banyak menerima tenaga kerja.

BP3TKI merupakan unit kerja BNP2TKI dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi warga negara yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran.
- b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI.
- d. Pelayanan penerbitan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (e-KTKLN).
- e. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI.
- f. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI.
- g. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan.
- h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon TKI melalui penempatan oleh pemerintah (G to G dan G to P).
- i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI.

- j. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi.
- k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah TKI.
- l. Fasilitas unit pelayanan satu pintu Layanan Terpadu Satu pintu (LTSP) dan Pos pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.
- m. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumag tangga balai.

Visi dari BP3TKI Pekanbaru : “Terwujudnya TKI Yang Berkualitas dan Bermartabat”, dan berikut adalah beberapa misi dari BP3TKI Pekanbaru:

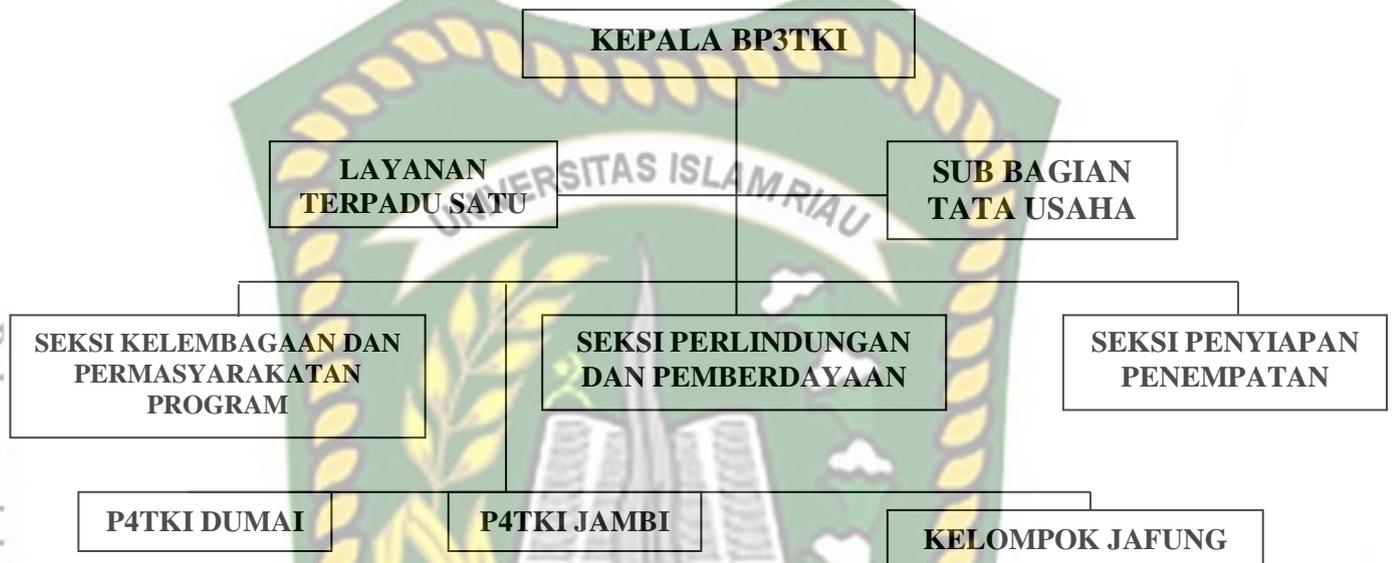
1. Mengisi peluang kerja dan menyiapkan Tenaga Kerja kompeten untuk pasar kerja luar negeri.
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penempatan TKI.
3. Meningkatkan kualitas Perlindungan dan Pemberdayaan TKI.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan BP3TKI Pekanbaru, tujuan yang akan dicapai oleh organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peta Potensi Calon Pekerja Migran Indonesia /Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kompetensi.
2. Terselenggaranya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Profesional.
3. Terselenggaranya pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna secara Profesional.

4. Terselenggaranya manajemen Administrasi Pelayanan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Gambar I.1: Struktur Organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru.**



Sumber : Balai BP3TKI Kota Pekanbaru Tahun 2019

Regulasi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru yaitu :

1. Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004, Tentang Penempatan dan Perlindungan
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006, Tentang badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER.11/KA/VII.2012 Tanggal 09 Juli 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Nomor : PER.35/KA/VIII/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan BNP2TKI.

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Indonesia (E-KTKLN) Kepala Tenaga Kerja Indonesia.

Tugas pokok BP3TKI Pekanbaru adalah perlindungan, penempatan, dan penyelesaian masalah TKI. Penempatan dan perlindungan diberikan kepada TKI legal yang berangkat ke luar negeri melalui pemerintah dengan prosedur yang benar. Namun pada tujuan pokok fungsi BP3TKI dalam penyelesaian masalah TKI, dilakukan pelayanan kepada TKI legal maupun ilegal maka permasalahan TKI ilegal juga ditangani oleh BP3TKI

Dalam Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru memiliki Rencana Kerja/Strategis) pada 2015-2019 disusun dengan maksud untuk dapat dijadikan acuan oleh seluruh organisasi / satuan kerja yang ada pada jajaran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru. Dalam hal rencana kerja ini mengupas tentang Tujuan strategis serta sasaran dan target rencana kerja atau strategis dari Rencana Strategis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai, sesuai dengan visi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia ( BP3TKI ) Pekanbaru yaitu “Terselenggaranya Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan yang professional untuk mewujudkan TKI yang berkualitas dan bermartabat “ maka sangat diperlukan sekali perencanaan yang matang dalam mencapai GOAL yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis/Rencana Kerja.

Tujuan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BP3TKI ) Pekanbaru mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia
2. Mewujudkan dan mengoptimalkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas.
3. Meningkatkan kemitraan Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) untuk memajukan perekonomian daerah serta mengurangi angka pengangguran di daerah.
4. Menyiapkan dan membekali peningkatan kualitas petugas dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sasaran Strategi atau Rencana Kerja BP3TKI Pekanbaru adalah Suatu Outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BP3TKI Pekanbaru dalam jangka waktu lima tahun. Adapun Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BP3TKI Pekanbaru tahun 2015- 2019 terdiri dari Kelembagaan BP3TKI Pekanbaru Terdapat 4 (empat) Kelembagaan yang diemban oleh BP3TKI terdiri dari Peningkatan Pelayanan Penempatan TKI; 21, Peningkatan Pelayanan Advokasi

Perlindungan hukum dan Pemberdayaan TKI purna, Peningkatan sosialisasi dan pembinaan kelembagaan, dan Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Administrasi BP3TKI.

Rencana Kerja atau Rencana Strategi memiliki pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilingkungan BP3TKI Pekanbaru. Formulir yang digunakan dalam mengukur 25 capaian kinerja adalah formulir sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pengukuran kinerja untuk indikator sasaran yang terdiri dari indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kegiatan kinerja yang merupakan realisasi tingkat pencapaian target dibandingkan dengan rencana tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai Penetapan Kinerja yang telah disepakati.

Renlaktiat adalah perencanaan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker untuk memproyeksikan waktu dan jumlah biaya pelaksanaan kegiatan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga dapat

tercapai tujuan dengan fokus, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Dengan adanya renlakgiat diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik, tidak tumpang tindih dan menumpuk diakhir tahun anggaran.

Renlakgiat terdiri dari :

### **1. Maksud**

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dalam merealisasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan.
- b. Sebagai bentuk bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah teknis administratif.
- c. Memberikan informasi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan BP3TKI Pekanbaru yang dilaksanakan.
- d. Menjadi bahan acuan untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan BP3TKI Pekanbaru bulan berikutnya.

### **2. Tujuan**

- a. Terinformasikannya realisasi pelaksanaan kegiatan BP3TKI Pekanbaru yang dilaksanakan.
- b. Terevaluasinya realisasi pelaksanaan kegiatan BP3TKI Pekanbaru yang dilaksanakan.

### 3. Ruang Lingkup

Laporan pada Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BP3TKI ) Pekanbaru meliputi kegiatan rutin yang bersumber pada kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran BP3TKI Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh BP3TKI Pekanbaru, P4TKI Dumai dan P4TKI Jambi.

#### a. Landasan Operasional

Adapun dasar laporan pelaksanaan tugas BP3TKI Pekanbaru adalah:

1. Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Instruksi Presiden R.I. Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 11/KA/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.035/KA/VIII/2007 jo Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.09/KA/II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI.
5. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : Per.47/KA/ XII/2008, tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Balai dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.

6. Surat Keputusan Kepala BP3TKI Nomor : Kep. 77 / BP3TKI-3 / II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan BNP2TKI Tahun 2018.
7. Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru tahun 2018 Nomor : SP-DIPA104.01.2.426412/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2018

Permasalahan yang sering di hadapi oleh BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Kota Pekanbaru) adalah banyaknya kecurangan dalam pendataan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya banyaknya TKI ilegal yang tidak memiliki data yang lengkap. Tetapi tetap diberangkatkan, dapat menimbulkan banyak nya permasalahan baru. Yaitu menyebabkan pihak BP3TKI tidak dapat melakukan tanggung jawabnya dikarenakan TKI yang berangkat tidak terdaftar dalam database TKI yang secara resmi. Maka pihak BP3TKI tidak dapat melakukan prosedur perlindungan terhadap TKI ilegal yang berangkat, selain itu dengan adanya TKI ilegal yang berangkat, membuat visa Negara tidak bertambah ini merupakan kerugian bagi Negara.

Selain permasalahan diatas ada juga permasalahan lainnya yaitu laporan tindak kekerasan terhadap TKI oleh majikan yang dilaporkan kepada pihak BP3TKI berperan sebagai perlindungan TKI melalui dasar hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada TKI yang berada diluar negeri.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja diharapkan penempatan TKI bisa dilakukan secara profesional sehingga tercipta TKI yang bermartabat.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tersebut hendaknya dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Terkait di Pusat dan Daerah mengikutsertakan peran PPTKIS. Sehingga dengan demikian penempatan dan perlindungan bagi TKI dilaksanakan secara terencana dan terkendali serta didukung oleh kebijakan peraturan perundangan yang berpihak kepada TKI sehingga setiap proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan PPTKIS

NO.	Uraian	Formal			Informal			Total		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pekanbaru									
	PT. Sukses Mandiri Utama	15	18	33				15	18	33

Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kota Pekanbaru pada PT. Sukses Mandiri Utama berjumlah 33 orang yang terbagi dalam

dua kategori yaitu formal dan informal. Penempatan TKI pada kategori formal terdapat sebanyak 15 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sedangkan kategori informal tidak terdapat penempatan TKI.

b. Rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Pendidikan

NO.	Pendidikan	BP3TKI Pekanbaru		
		L	P	Jml
1	Tidak Sekolah			
2	SD	4	1	5
3	SLTP	4	2	6
4	SMA	20	18	38
5	Sarjana Muda	1		1
6	Sarjana	1		1
7	Pasca Sarjana			
Total		30	21	51

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Pendidikan paling banyak berada pada jenjang SMA berjumlah 38 orang, laki-laki 20 orang dan perempuan 18 orang. Sedangkan rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan pendidikan paling sedikit berada pada jenjang Sarjana dan Sarjana Muda berjumlah masing-masing 1 orang laki-laki. Tidak terdapat TKI dalam jenjang pendidikan Tidak Sekolah dan Pasca Sarjana.

c. Rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Negara Tujuan

NO.	Negara Tujuan	BP3TKI Pekanbaru		
		L	P	Jml
1	Malaysia	18	19	37
2	Arab Saudi			
3	Inggris			
4	Brunai Darussalam	1		1
5	Taiwan		1	1
6	Suriname	1		1
7	Abu Dhabi			
8	Timor Leste			
9	UEA	2		2
10	Dubai			
11	Rusia			
12	Salomon	8		8
13	Papua Nugini		1	1
Total		30	21	51

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan

Negara Tujuan jumlah TKI terbanyak berada pada negara Malaysia dengan jumlah 37 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 19 orang perempuan. Sedangkan rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Negara Tujuan paling sedikit berada pada Brunai Darussalam dengan jumlah 1 orang laki-laki, Taiwan 1 orang perempuan, Suriname 1 orang laki-laki, dan Papua Nugini 1 orang perempuan.

## d. Rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Daerah Asal

NO.	Daerah Asal	BP3TKI Pekanbaru		
		L	P	Jml
1	Pekanbaru	10	3	13
2	Jambi / Kerinci/Sei Penuh	4		4
3	Bengkalis	10	11	21
4	Bengkulu	1		1
5	Dumai			
6	Sumbar	1		1
7	Inhil	1		1
8	Siak		5	5
9	Asahan			
10	Bengkulu			
11	Rohil		1	1
12	Pelalawan	1		1
13	Medan			
14	Sumsel	1		1
15	Rohul		1	1
16	Kampar	1		1
17	Pasaman			
18	Kep. Meranti			
Total		30	21	51

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Daerah Asal jumlah TKI terbanyak berasal dari Bengkalis dengan jumlah 21 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sedangkan rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Daerah Asal paling sedikit berasal dari Bengkalis, Sumbar, Inhil, Rohil, Pelalawan, Sumsel, Rohul dan Kampar dengan masing-masing 1 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

e. Rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan Sektor Pekerjaan

NO.	Sektor Pekerjaan	BP3TKI Pekanbaru		
		L	P	Jml
1	Kebun/ladang			
2	Operator/IT	5		5
3	Kilang		18	18
4	Bangunan/konstruksi	17		17
5	Pertanian/peternakan/perdagangan	7		7
6	Industri pengolahan			
7	Pelaut	1		1
8	PLRT		2	2
9	Jasa sosial,Kemasyarakatan			
10	Restoran		1	1
11	Cleaner			
Total		30	21	51

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan sektor pekerjaan jumlah TKI terbanyak terdapat pada sektor Kilang dengan jumlah 18 orang yang semuanya terdiri dari perempuan. Sedangkan rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan sektor pekerjaan paling sedikit terdapat pada sektor Pelaut yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan sektor restoran yang terdiri dari 1 orang perempuan.

Kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan bertujuan untuk memberikan pengarahan, pemahaman dan informasi kepada calon TKI tentang prosedur bekerja ke luar negeri, hak dan kewajiban sebagai Tenaga Kerja Indonesia serta hal-hal penting yang perlu dilakukan selama bekerja ke luar negeri, diantaranya :

1. Materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang diberikan kepada calon TKI diantaranya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan, pemahaman tentang isi dan cara pelaksanaan Perjanjian Kerja, pembinaan mental kepribadian, dan pemahaman tentang bahaya Perdagangan narkoba, obat terlarang, pola hidup sehat dan trafficking.
2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu dilaksanakan di kelas untuk TKI yang proses keberangkatannya melalui PPTKIS dan secara Parsial untuk TKI yang bekerja secara profesional, Mandiri, Re-entry maupun Pelaut.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) calon TKI di BP3TKI Pekanbaru, P4TKI Dumai dan P4TKI Sungai Penuh - Jambi ditetapkan tim Instruktur / Pengajar Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI.

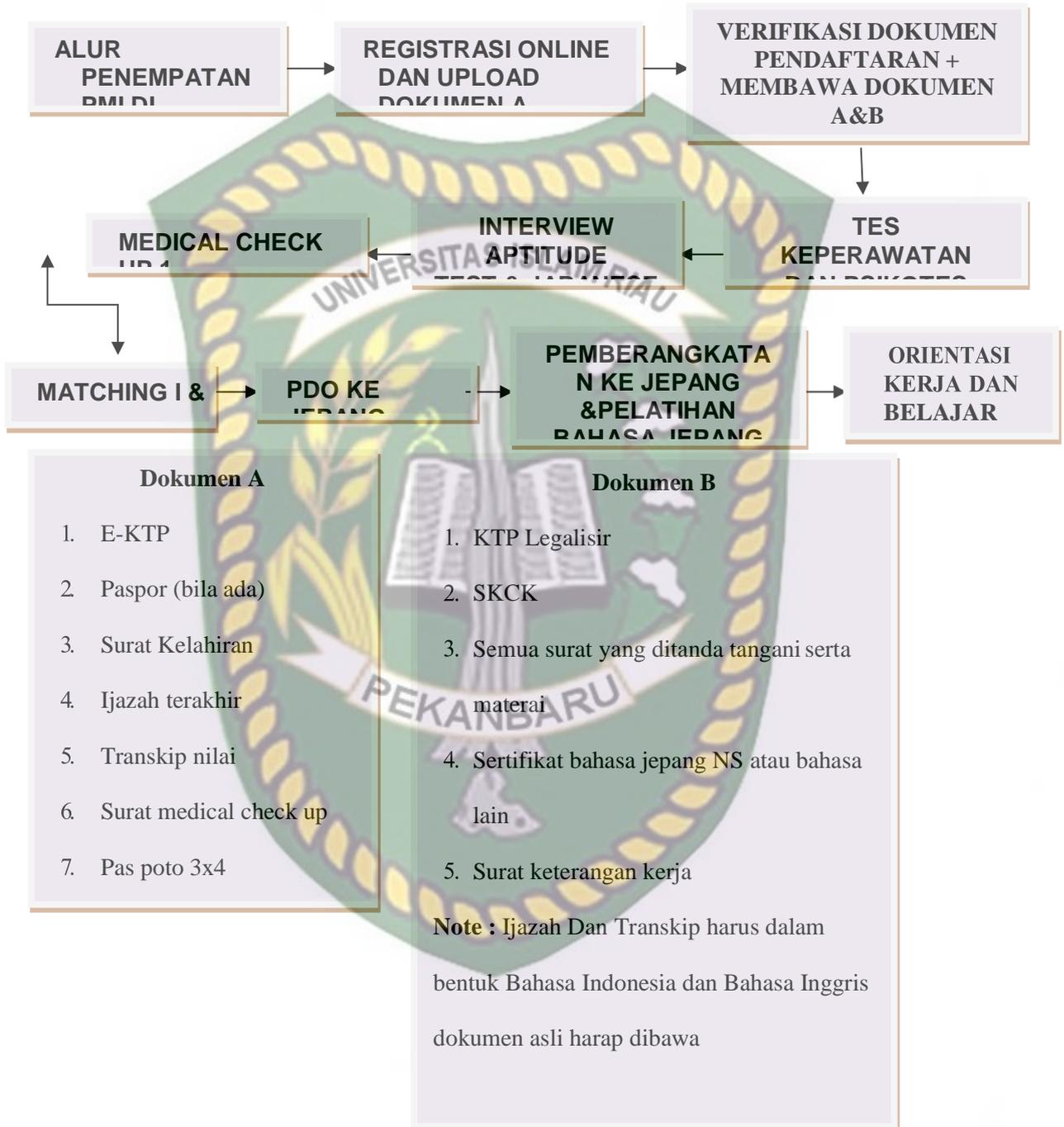
Kerjasama BP3TKI dengan DISNAKER sebatas kerjasama kegiatan gabungan, seperti rapat acara dan pelatihan pegawai bersama dengan instansi terkait seperti BNP2TKI, LP4TKI, dan P4TKI. Untuk kegiatan pengiriman, pengurusan, dan kegiatan terkait dengan tenaga kerja di lakukan sesuai dengan SOP instansi masing-masing.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar I.II :Data Tenaga Kerja Internasional



BP3TKI dengan DISNAKER sebatas kerjasama kegiatan gabungan, seperti rapat acara dan pelatihan pegawai bersama dengan instansi terkait seperti BNP2TKI, LP4TKI, dan P4TKI. Untuk kegiatan pengiriman, pengurusan, dan kegiatan terkait dengan tenaga kerja di lakukan sesuai dengan SOP instansi masing-masing.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :“**Bagaimana evaluasi pelaksanaan tugas BP3TKI di Kota Pekanbaru?**”

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan evaluasi pelaksanaan tugas BP3TKI di kota Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis, akademis, dan empirisnya sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kebijakan publik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi BP3TKI dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

- c. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target dan tujuan organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa administrasi punya peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan organisasi.

Dalam konsep Administrasi memiliki dua artian yaitu administrasi dalam artian luas dan administrasi dalam artian sempit. Administrasi dalam artian luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Sedangkan dalam artian sempit administrasi adalah kegiatan tulis-menulis, catat-mencatat, ketik-mengetik dan surat-menyurat, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. (Beddy Iriawan Maksudi, 2019:25)

Menurut Siagian Administrasi di definisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafri,2012;9)

Selain itu, secara sempit administrasi dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dari definisi administrasi tersebut kita dapat mengetahui 3 hal penting berikut ini:

- a. Administrasi adalah sebuah seni sekaligus proses. Sebagai seni, administrasi membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional karena selalu terkait dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat.
- b. Dalam administrasi terdapat unsur-unsur tertentu, diantaranya; terdapat dua atau lebih orang di dalamnya, terjadi kerjasama antar orang tersebut yang sifatnya formal dan hirarkis, memiliki tujuan, terdapat tugas, ketersediaan sarana dan prasarana.
- c. Administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia dimana administrasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian administrasi menurut para ahli:

- a. George R. Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang telah di tetapkan.
- b. Arthur Grager, administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.
- c. Ulbert, administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan definisi administrasi secara dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha.

Berdasarkan pengertian administrasi diatas dapat di simpulkan bahwa adminstrasi adalah kegiatan interaksi individu dengan individu lainnya melalui interaksi dalam pelaksanaan sebuah organisasi menggunakan kegiatan administrasi yang melakukan menataan, pengelolaan, dan pengorganisasian kegiatan.

Menurut Miftah Toha (1990:24) menyebutkan bahwa unsur administari adalah bagian dari suatu kebulatan-kebulatan.Tidak adanya unsur bukan berarti suatu kejadian atau suatu akibat itu tidak ada akibat atau kejadian itu ada tetapi kurang sempurna.

Dari pengertian tersebut unsur administrasi adalah bagian-bagian penting dalam administrasi yang menjadikan administrasi itu utuh dan sempurna sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasi atau terkoordinasi sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama. (Beddy Iriawan Maksudi, 2019:39).

Organisasi menurut Hasibuan (2014:2) adalah suatu sistem, memiliki struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.

Apabila kita membicarakan organisasi sebagai suatu sistem, berarti memandangnya terdiri dari unsur-unsur yang saling bergantung dan di dalamnya terdapat sub-sub sistem. Sedangkan struktur di sini mengisyaratkan bahwa di dalam organisasi terdapat suatu kadar formalitas dan adanya pembagian tugas atau peranan yang harus dimainkan oleh anggota-anggota kelompoknya.

Istilah organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya prinsip atau komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di

dalam perhimpunannya terdapat pula hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang di pimpin atau bawahannya.

Kedua definisi diatas, dapat dinyatakan betapa pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala kebijakan dan keputusan yang dibuat pada tingkatan administrative maupun manajerial. Dalam hubungan ini, hakiki organisasi dapat di tinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai wadah, tempat dimana kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan. Kedua, sebagai proses yang berusaha menyoroti interaksi (hubungan) antara orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut.

Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menegaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen.
- b. Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab.

Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok.

Pengertian organisasi menurut para ahli :

Menurut Manullang (dalam Karyoto 2016:30) organisasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama melakukan kegiatan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2012:115) mendefinisikan organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Barnard (dalam Thoha, 2008:167) organisasi adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi secara sadar, atau sesuatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan ikatan yang terdapat dalam suatu tujuan yang telah ditetapkan ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Hasibuan (2011:120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Definisi diatas menjelaskan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan yang formal.

Jadi dapat disimpulkan organisasi adalah suatu perkumpulan atau gabungan dari orang-orang yang telah sepakat melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu atau seni. Disebut demikian, karena sudah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. (Beddy Iriawan Maksudi, 2019:76)

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Didalam manajemen memiliki fungsi-fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan controlling. Yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang membantu proses manajemen didalam keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Haiman (dalam Zulkifli dan Nurmasari 2015:5) manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2014;2) Manajemen adalah seni atau ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara definisi lain, layaknya istilah-istilah lain dalam kajian ilmu sosial, manajemen juga memiliki definisi yang diberikan para ahli. Disini hanya akan dikemukakan satu definisi yang diungkapkan oleh George R Terry sebagai berikut :

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggiatan, dan Pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pengertian lain manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Terdapat faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyelesaian:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi (SDM, SDA, SDD, SDI).
- b. Adanya proses yang bertahap (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian).
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **4. Konsep Evaluasi**

Evaluasi merupakan suatu komponen dalam manajemen program pelatihan. Suatu kegiatan pelatihan harus dimulai dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi, sehingga proses pelatihan dapat dinyatakan lengkap dan menyeluruh.

Fruchey (1973:5) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan berangkaik mulai dari pengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penilaian dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan pelaksanaan informasi.

Suharsimi Arikunto (2004:3) :mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Brinkerhoff dalam Sawitri (2007:13) mengemukakan bahwa evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya.

Ada pun untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas BP3TKI di kota Pekanbaru penulis menggunakan konsep Menurut Bridgen & Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002: 138) mengacu pada output indikator pokok yaitu input, proses, output dan outcome. Masing-masing indikator tersebut akan di jelaskan berikut ini:

a) Indikator Input (Masukkan)

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan bahan dasar yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukungn lainnya.

b) Indikator Process (Proses)

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

c) Indikator Output (Hasil)

Indikator hasil, memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan public. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut.

d) Indikator outcomes (Dampak).

Indikator dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

## 5. Konsep Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Sondang P.Siagian mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para

bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Janice (2015) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

## 6. Konsep Pelindungan Tenaga Kerja

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa :

“ Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar atau ditempatkan diluar negeri untuk melakukan pekerjaan.

Selanjutnya, pada Pasal 01 ayat (3) UUNo.39/2004 menyebutkan:

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan memberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, penguras dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan negara tujuan”

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa TKI ditempatkan diluar negeri untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemerintah dan pelaksanaan penempatan TKI swasta dapat melakukan pengiriman TKI.

Menurut Pasal 04 UU No.39/2004, perseorangan tidak diperkenankan untuk melakukan penempatan TKI diluar negeri. Dalam

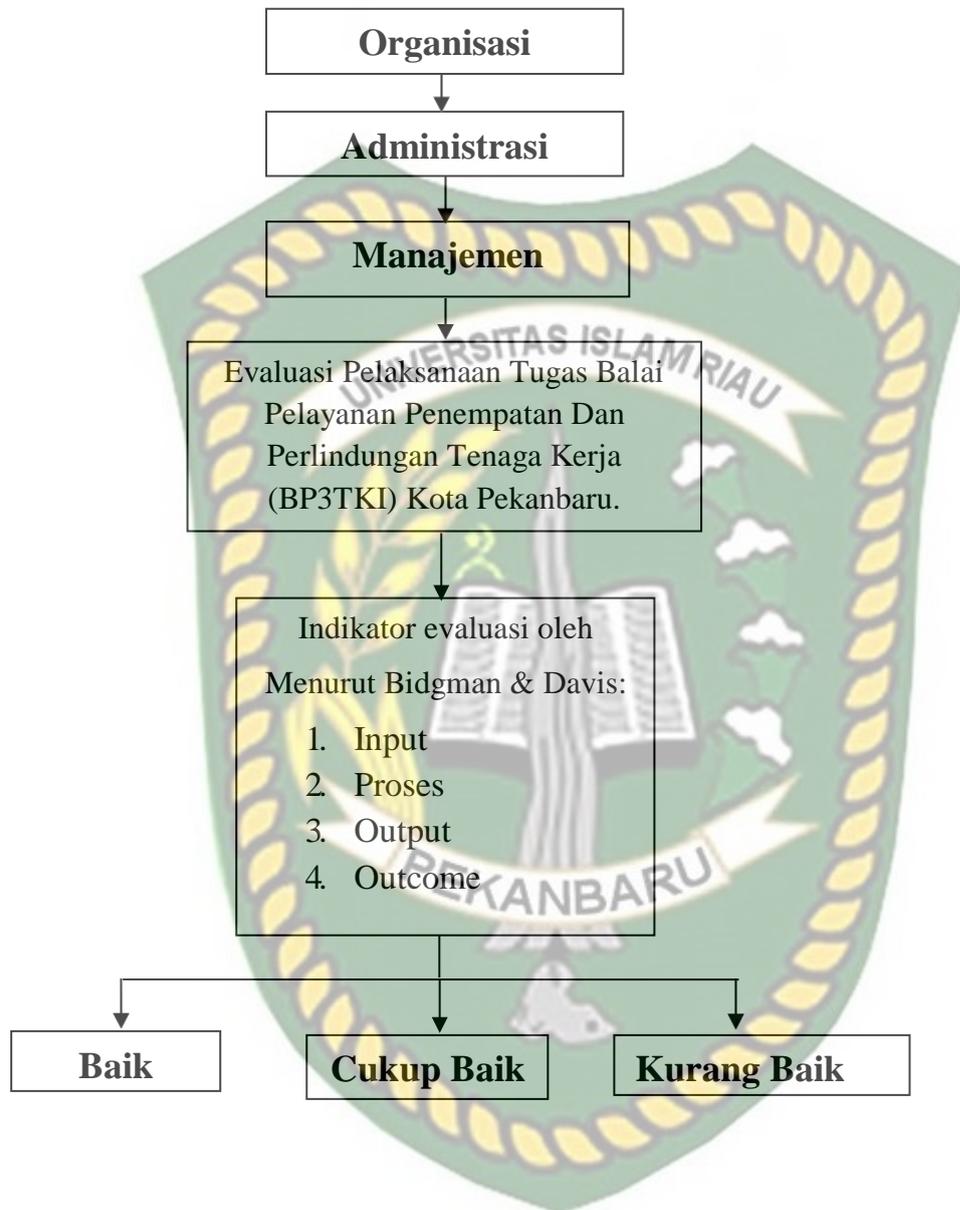
melaksanakan penempatan TKI diluar negeri oleh pemerintah, harus ada perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI dinegara tujuan. Penempatan TKI diluar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah buat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Kerangka Pikir



**Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Pekanbaru.**

Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2019

### C. Hipotesis

Hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah : Di duga kinerja Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bisa berjalan dengan baik apabila ada indikator seperti: Input, Proses, Output, Outcome.

### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah melaksanakan penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Administrasi di definisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas pemikiran yang sama dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang di sebut sebagai atasan dan seorang atau sekelompok yang di sebut sebagai bawahan.
3. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu.
4. Konsep Evaluasi adalah suatu aktivitas yang di rancang untuk menimbang manfaat suatu program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis serta bentuk rekomendasi.

5. Konsep Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
6. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja adalah segala bentuk usaha atau upaya melindungi tenaga kerja baik itu perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Perlindungan tenaga kerja juga mencakup perlindungan kesehatan dan sebagainya.
7. BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyediaan seluruh dokumen penempatan TKI.
8. Input adalah semua potensi yang dimasukkan kedalam sebuah proses.
9. Proses adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output/hasil.
10. Output adalah hasil dari pemrosesan input.
11. Outcome adalah efek jangka panjang dari proses berupa manfaat atau harapan perubahan.
12. Kota Pekanbaru merupakan pusat kota di Provinsi Riau
13. Komitmen pimpinan organisasi adalah keputusan yang dibuat untuk kemajuan organisasi.
14. Kemampuan organisasi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau program yang ditentukan.
15. Komitmen para pelaksana adalah sikap atau tindakan yang dilakukan demi terlaksananya kelancaran kegiatan organisasi.

16. Dukungan kelompok dan orang-rang yang terlibat dalam organisasi tersebut.
17. Banyak aktor yang terlibat adalah pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan.
18. Terdapatnya komitmen pada seluruh orang yang terlibat dan pelaksanaan tugas masing-masing didalam organisasi.

#### E. Operasional Variabel

Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru.

**Tabel II.1 Tabel Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	
“Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan ke efesiensi. (Bridgaman& Davis)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru	a. Input	- Ketersediaan Sumber Daya - Sarana dan Prasaanan	- Baik - Cukup baik - Kurang baik
		b. Proses	- Eektivitas pelaksanaan tugas BP3TKI - Efesiensi pelaksanaan Tugas BP3TKI	- Baik - Cukup baik - Kurang Baik
		c. Output	- Tenaga yang terlindungi - Tenaga kerja yang handal	- Baik - Cukup baik - Kurang Baik

		d. Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan TKI sesuai dengan ketentuan</li> <li>- Dampak dari pelaksanaan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baik</li> <li>- Cukup Baik</li> <li>- Kurang Baik</li> </ul>
--	--	------------	---	---

Sumber : Mofikasi Penulis, Tahun 2019

#### F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru. Maka dapat diukur dengan klasifikasi : Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

**Baik** : Apabila keempat indikator dapat dijalankan semua atau jawaban responden pada kategori baik berada pada 67%-100%.

**Cukup Baik** : Apabila dari empat indikator maka yang dapat dijalankan hanya 2-3 saja atau jawaban responden pada kategori cukup baik berada pada 34%-66%.

**Kurang Baik** : Apabila dari empat indikator maka yang dapat dijalankan hanya 1 saja atau tidak ada sama sekali atau jawaban responden pada kategori kurang baik berada pada 1%-33%

Sedangkan untuk pengukuran variabel digunakan kategori sebagai berikut:

1. Indikator Input (masukan) dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua variabel indikator, atau jawaban responden pada table 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori cukup baik, atau jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori kurang baik, atau jawaban responden pada tabel 0%-33%.

2. Indikator Proses (proses) dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua variabel indikator, atau jawaban responden pada table 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori cukup baik, atau jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori kurang baik, atau jawaban responden pada tabel 0%-33%.

3. Indikator Output (keluaran) dapat dikatakan:

Baik : Apabila semua variabel indikator, atau jawaban responden pada table 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori cukup baik, atau jawaban responden pada table 34%-66%.

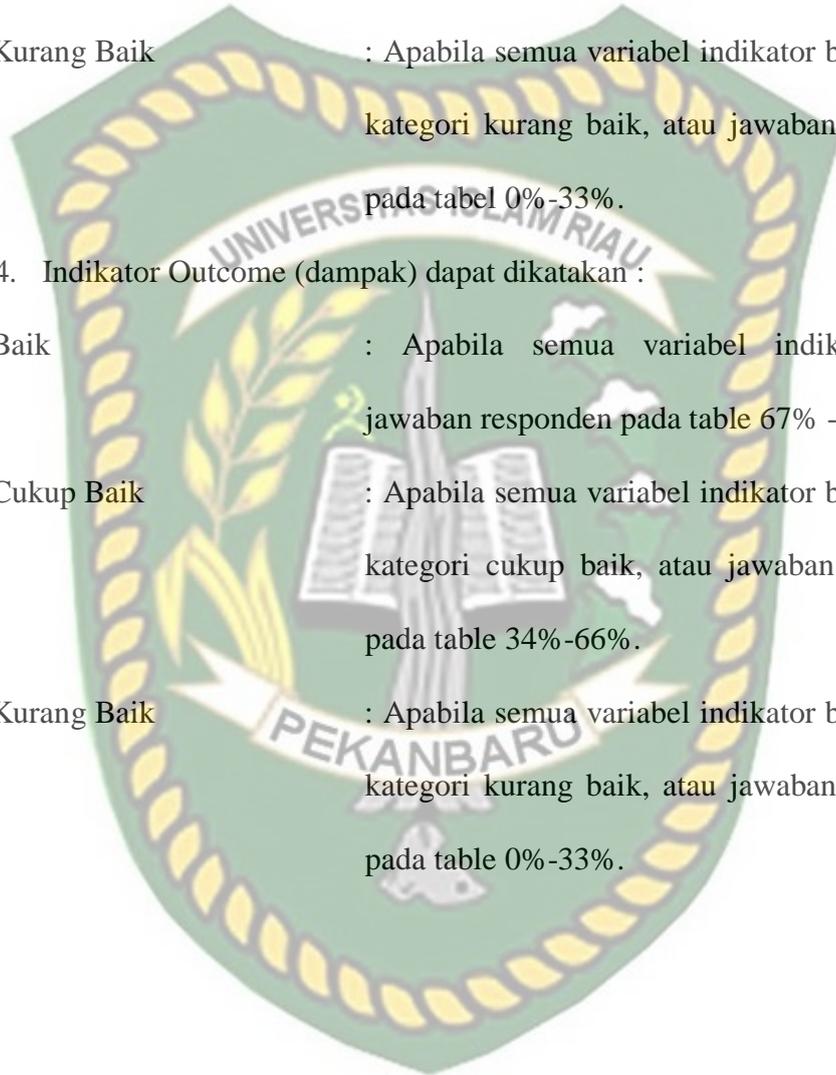
Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori kurang baik, atau jawaban responden pada tabel 0%-33%.

4. Indikator Outcome (dampak) dapat dikatakan :

Baik : Apabila semua variabel indikator, atau jawaban responden pada table 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori cukup baik, atau jawaban responden pada table 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila semua variabel indikator berada pada kategori kurang baik, atau jawaban responden pada table 0%-33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian survey diskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian ini dilakukan yang berdasarkan ada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi hasil terhadap masalah penelitian ini (sugiyono, 2014:43)

Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan kata-kata atau narasi berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan, dengan metode ini penulis diharapkan mendapat hasil penelitian yang objektif.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru, alasan penulis melakukan penelitian didaerah ini adalah karena tempat yang mudah untuk dijangkau serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada disana.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014 : 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini sebagai populasi terdiri atas kepala Balai, keseluruhan pegawai, dan seluruh calon TKI dan TKW.

## 2. Sample

Sample menurut Sugiyono (2014:91) sample adalah bagian dari karakteristik dari populasi tersebut. Bila populasi tersebut terlalu besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).

**Tabel III.1 Populasi dan sampel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas BP3TKI di Kota Pekanbaru.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sample	Jumlah
1.	Kepala Balai	1	1	100%
2	Sub bagian tata usaha	1	1	100%
3	Seksi kelembagaan dan masyarakat	1	1	100%
4	seksi perlindungan dan pemberdayaan	1	1	100%
5	Seksi penyiapan penempatan	1	1	100%
6	Staf pengurusan penjalanan	1	1	100%
7	Calon TKI/TKW	~	30	~
	Jumlah	-	36	-

Sumber : Balai BP3TKI Kota Pekanbaru 2020

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparaturnya adalah teknik sensus untuk aparaturnya pemerintah yaitu seluruh populasi yang ada dijadikan sampel penelitian dengan alasan jumlah sampel yang relative sedikit dan berada pada satu tempat sedangkan untuk calon TKI dan TKW digunakan teknik insidental sampling yaitu calon TKI yang sedang mengurus perizinan pemberangkatan keluar negeri.

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator untuk memperoleh hasil analisa yang jelas mengenai Balai BP3TKI di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan tenaga kerja dan selain itu juga terdiri dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai tugas tugas balai.

##### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku, data, dokumen, dan data yang telah tersedia di Balai BP3TKI di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraannya, serta berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

## F. Tektik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

a. Kuosioner

Adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai permasalahan, kemudian disebarkan kepada responden terpilih untuk disesuaikan dengan alternatif dan jawaban yang telah disediakan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung terhadap responden dan narasumber terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas BP3TKI di Kota Pekanbaru.

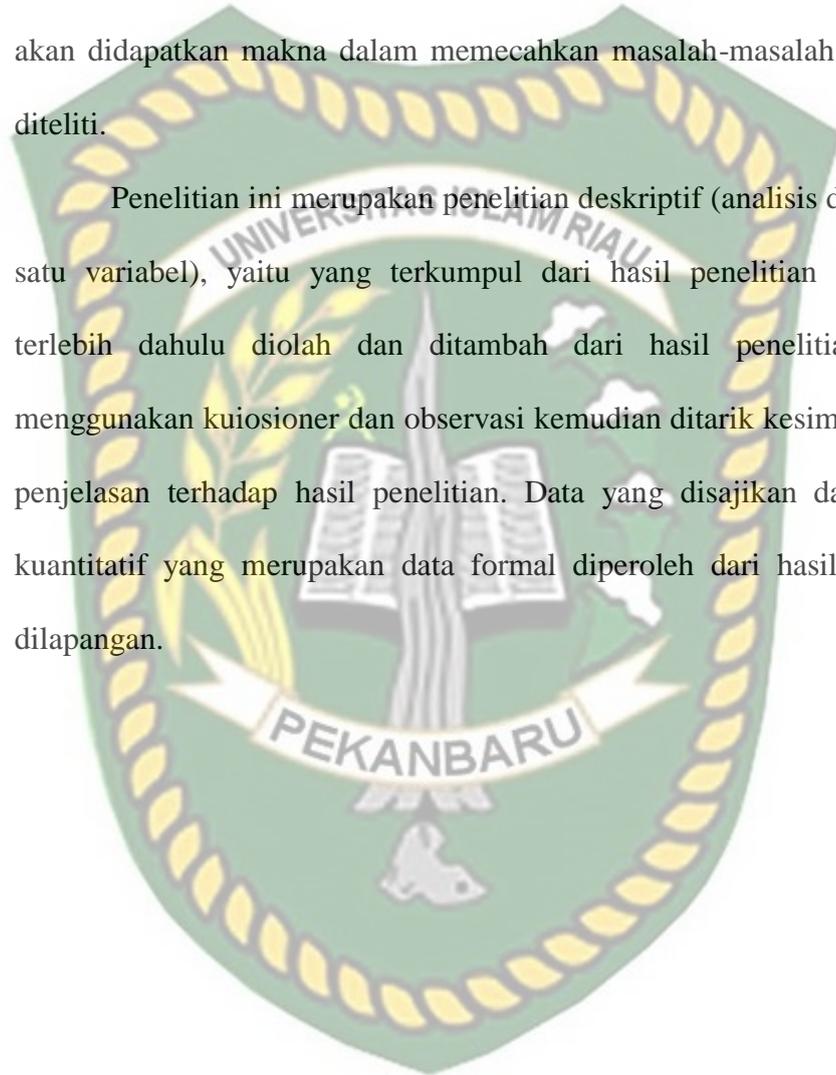
d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan fasilitas dan mengabadikan momen.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (analisis data dengan satu variabel), yaitu yang terkumpul dari hasil penelitian wawancara terlebih dahulu diolah dan ditambah dari hasil penelitian dengan menggunakan kuisioner dan observasi kemudian ditarik kesimpulan serta penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk kuantitatif yang merupakan data formal diperoleh dari hasil penelitian lapangan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Terbentuknya Kota Pekanbaru

**Kota Pekanbaru** adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindahke tempat pemukimana baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai siak. Namun payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

## B. Luas Wilayah dan Kependudukan

Luas wilayah Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

## C. Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru

### 1. Sejarah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru.

BP3TKI ( Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ) Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI ( Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ) dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi warga negara yang bekerja ke luar negeri. BP3TKI Pekanbaru memiliki 2 Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yakni P4TKI Dumai dan P4TKI Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Dasar pelaksanaan tugas BP3TKI Pekanbaru ialah :

- a. Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004, Tentang Penempatan dan Perlindungan.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Nomor : PER.11/KA/VIII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia Nomor : PER.35/KA/VIII./2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan BNP2TKI.

- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Indonesia (E-KTKLN) Kepala Tenaga Kerja Indonesia.

## **2. Tugas dan Fungsi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dikota Pekanbaru.**

Berdasarkan peraturan kepala BNP2TKI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka tugas dan fungsi BP3TKI pekanbaru adalah sebagai berikut :

### a. Tugas

Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru melaksanakan tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja BP3TKI Pekanbaru

### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut BP3TKI Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan menempatkan dan perlindungan PMI

3. Perasyarakatatan program penempatan dan perlindungan PMII
4. Pemetaan suplay dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon PMI
5. Pendaftaran dan seleksi Calon PMI (bagi penempatan Pemerintah)
6. Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI
7. Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
8. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
9. Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI
10. Pemantauan Penempatan dan Perlindungan PMI Dinegara
11. Penempatan Berkoordinasi Dengan Perwakilan RI
12. Pelaksanaan mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah PMI
13. Pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) /PMI bermasalah (PMI-B)/PMI purna dan keluarganya
14. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penempatan dan perlindungan PMI, dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BP3TKI

Pekanbaru

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden Penelitian

Untuk mengetahui jumlah responden maka membutuhkan data identitas responden berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, itu semua berfungsi untuk mengetahui gambaran kondisi responden yang terlibat di dalam penelitian ini guna untuk memperjelas mengenai hasil penelitian. Berikut identitas responden penelitian ini dapat dilihat pada dibawah ini :

**Tabel V.I. Distribusi jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1.	Laki-laki	6	17%
2.	Perempuan	30	83%
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden dari pegawai BP3TKI di kota Pekanbaru lebih dominan perempuan pada ke ikut sertaan mengisi angket dengan jumlah 30 responden atau 83% sedangkan laki-laki berjumlah 6 orang atau 17%. Kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Penjelasan mengenai kelompok umur untuk melihat gambaran dari umur responden pada penelitian ini.

Berikut tabel mengenai informasi pengelompokan umur:

**Tabel V.2. Distribusi jumlah Responden berdasarkan Tingkat umur**

No	Umur	Responden	Persentase
1	20-30	10	28%
2	31-41	23	64%
3	41-50	1	2%
4	>50	2	6%
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden memiliki variasi umur yang memang seperti itu yang di inginkan peneliti. Penelitian pada tingkat umur sebanyak ialah 20-30 tahun yaitu berjumlah 10 orang atau 28%, 31-41 berjumlah 23 orang atau 64%, 41-50 berjumlah 1 orang atau 2%, dan >50 berjumlah 2 orang atau 6%.

Berikutnya akan dijelaskan identitas tingkat pendidikan responden agar dapat melihat gambaran bagaimana keadaan responden dari tingkat pendidikan terakhirnya, maka distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.3 Distribusi Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan ( Calon Tenaga Kerja Indonesia )**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	2	6%
2	SLTP	10	28%
3	SLTA	21	58%
4	DIPLOMA	-	-
5	SARJANA (S1/S2)	3	8%
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan di dominasi oleh tingkatan SLTA yaitu berjumlah 21 responden atau 58%, SLTP yaitu berjumlah 10 responden atau 28%, sarjana yaitu berjumlah 3 responden atau 8%, dan SD yaitu berjumlah 2 responden atau 6%.

#### **B. Hasil dan Pembahasan**

Pada sub bab ini akan di jelaskan dan di paparkan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai tanggapan responden penelitian yang terdiri dari pegawai BP3TKI bidang terkait, calon tenaga kerja Indonesia.

Untuk lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan peneliti dapat dilihat sebagai berikut:

## 1. Input

Indikator input memfokuskan pada sumber daya pendukung dan bahan bahan dasar yang di perlukan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang dan infrastruktur lainnya.

Setelah kusioner di sebarakan kepada responden penelitian, kemudian data diolah maka untuk indikator Pencapaian Tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel V.4 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Input (Dinas).**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketersediaan Sumber Daya	5	1	0	6
		83%	17%	0%	
2	Sarana dan Prasarana	4	2	0	6
		67%	33%	0%	
Jumlah		9	2	0	12
Rata-rata		4	1	0	5
Persentase (%)		67%	12%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Input pada item ketersediaan sumber daya responden menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83%, cukup baik sebanyak 1 responden atau 17%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%, tetapi menurut pengamatan

peneliti untuk item ketersediaan sumber daya lebih dari baik karena ketersediaan sumber daya manusia pada balai selalu tersalurkan hal ini dapat di buktikan dai pengamatan peneliti secara langsung dilapangan bahwa kegiatan pendataan calon tenaga kerja Indonesia selalu ada hampir setiap hari. Dari item sarana dan prasarana yang menjawab baik 4 responden atau 67% yang menjawab baik 2 responden atau 33% yang menjawab cukup baik dan 0 responden atau 0% yang menjawab kurang baik, tetapi menurut pengamatan peneliti untuk item sarana dan prasarana sudah baik karena ketersediaan sarana dan prasarana di kantor BP3TKI memadai dari aspek keamanan penanganan kesehatan dan alat-alat yang digunakan cukup canggih.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penyebaran kusioner untuk indikator Input adalah responden yang menjawab baik dengan rata-rata 4 atau 67% yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 1 atau 12% dan yang menjawab kurang baik dengan rata-rata 0 atau 0.

Hal ini di benarkan oleh salah satu pegawai bagian Kasubbag TU oleh Ibu Haslinda yang saya wawancarai beliau berkata :

*“ Ketersedian Sumber Daya di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sudah baik, yang dimana ketersediaan memiliki kelengkapan disetiap melakukan penempatan TKI, Bagian sarana dan prasarana pun sudah memiliki pembaruan dibagian alat-alat computer, alat tulis dan lain lainnya yang dimiliki oleh kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru.” (Wawancara dengan kepala sub bagian Tata Usaha Ibu Haslinda, 23 November 2020).*

Berdasarkan hasil kusioner dinas terhadap kusioner input menunjukkan baik tetapi berdasarkan pengamatan berdasarkan pengamatan

yang peneliti lakukan dilapangan belum sebaik seperti pada indikator ini. Hal itu juga di bantu oleh pengamatan peneliti terhadap sarana dan prasarana kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden masyarakat yang berjumlah 30 orang terhadap indikator pencapaian tujuan dengan metode pengumpulan data kuisisioner akan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.5 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Input (Calon Tenaga Kerja Indonesia)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketersediaan Sumber Daya	13 43%	17 57%	0 0%	30
2	Sarana dan Prasarana	20 67%	10 33%	0 0%	30
Jumlah		33	27	0	60
Rata-rata		17	1	0	30
Persentase (%)		57%	43%	0%	100%

**Sumber: Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Input pada item ketersediaan sumber daya responden menjawab baik sebanyak 13 responden atau 43%, cukup baik sebanyak 17 responden atau 57%, dan yang

menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%, dari item sarana dan prasarana yang menjawab baik 4 responden atau 67% yang menjawab baik 2 responden atau 33% yang menjawab cukup baik dan 0 responden atau 0% yang menjawab kurang baik. Maka dapat di simpulkan rata-rata responden yang menjawab baik sebanyak 17 orang atau 57%, yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 1 orang atau 43% dan yang menjawab kurang baik dengan rata-rata 0 orang atau 0%.

Maka hasil untuk indikator input dari CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) dominan adalah Baik.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat terlihat bahwa indikator input dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sudah baik dengan data yang peneliti peroleh dan analisa karena berdasarkan data 2 tahun kegiatan kerja kantor BP3TKI tidak terganggu atau terhambat dalam ketersediaan sumber daya maupun dalam hal sarana dan prasarana hanya saja untuk sarana dan prasarana butuh perbaikan sedikit atau upgrade di beberapa sektor atau bagian.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara dan observasi, maka untuk indikator input berada pada kategori baik.

## 2. Proses

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada

masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektifitas dan efesiensi dari metode atau cara yang dipakai yang digunakan.

Setelah melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden dan pengelola data maka untuk indikator Proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Proses (Dinas)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektifitas Pelaksanaan	6	0	0	6
	Tugas BP3TKI	100%	0%	0%	
2	Efesiensi Pelaksanaan	4	2	0	6
	Tugas BP3TKI	67%	33%	0%	
Jumlah		10	2	0	12
Rata-rata		5	1	0	6
Persentase (%)		83%	17%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item efektifitas pelaksanaan tugas BP3TKI responden yang menjawab Baik sebanyak 6 responden atau 100% dan yang menjawab cukup baik sebanyak 0 responden atau 0% dan yang menjawab kurang efektif sebanyak 0 responden atau 0%, tetapi berdasarkan observasi

yang peneliti lakukan pada pegawai bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa kasus dimana ctki atau calon tenaga kerja Indonesia gagal di berangkatkan yang di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti ketidak lengkapannya data personal, dari faktor itu saja bisa dilihat bahwa efektifitas pelaksanaan tugas BP3TKI belum sepenuhnya baik karena hambatan atau pengagalan keberangkatan ctki.

Kemudian pada item penilaian kedua yaitu efisiensi pelaksanaan tugas BP3TKI yang menjawab baik sebanyak 4 responden atau 67% yang menjawab cukup baik sebanyak 2 responden atau 33% dan yang menjawab kurang baik 0 responden atau 0%, menurut peneliti untuk item penilaian efisiensi pelaksanaan tugas BP3TKI adalah cukup baik, efisiensi kinerja dan pelaksanaan tugas BP3TKI sudah cepat dan efisien tetapi masih ada sedikit kasus dimana ada penguluran waktu atau pengunduran pada saat keberangkatan. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala bagian Tata Usaha salah satu faktor yang menyebabkan masalah terhadap efektifitas dan efisiensi adalah kesalahan pendataan data CTKI yang dilakukan oleh petugas.

Hal itu bisa peneliti benarkan karena berdasarkan observasi peneliti di lapangan menemukan adanya petugas yang melakukan kesalahan pendataan pada pendataan sidik jari yang menyebabkan pengulangan pendataan sidik jari. Maka pada indikator Proses jawaban responden yang dominan Baik.

Hal ini di benarkan oleh salah satu pegawai bagian Kasi Kelembagaan Pemasarakatan Program oleh Bapak James Lumban Gaol yang saya wawancarai beliau berkata :

“ Efektifitas Pelaksanaan Tugas BP3TKI sudah baik, yang dimana kegiatan dalam melakukan penempatan tki-tki sendiri berjalan dengan ketentuan dan visi-misi yang telah diterapkan, sedangkan Efisiensi Pelaksanaan Tugas BP3TKI dikatakan cukup baik karena perbaikan dalam proses belum berjalan dengan cepat, masih ada terjadinya hambatan”(Wawancara dengan Kasi Kelembagaan Pemasyarakatan Program Bapa James Lumban Gaol, 23 November 2020).

Analisis jawaban Dinas terhadap indikator Proses adalah baik tetapi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan hanya cukup baik, untuk indikator proses. Kemudian peneliti melakukan observasi kepada calon tenaga kerja Indonesia sebagai bahan perbandingan atas jawaban dinas.

Selanjutnya mengetahui jawaban responden calon TKI sebanyak 30 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.7 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Proses (Calon Tenaga Kerja Indonesia)**

NO	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas Pelaksanaan Tugas BP3TKI	20	10	0	30
		67%	33%	0%	
2	Efisiensi Pelaksanaan Tugas BP3TKI	5	25	0	30
		17%	83%	0%	
	Jumlah	25	35	0	60
	Rata-rata	13	17	0	30
	Persentase (%)	43%	57%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item efektifitas pelaksanaan tugas BP3TKI respodennya menjawab baik sebanyak 20 responden atau 67%, dan menjawab cukup baik sebanyak 10 responden atau 33%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%. Kemudian pada item penilaian kedua yaitu efisiensi pelaksanaan tugas BP3TKI yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 17% dan yang menjawab cukup baik sebanyak 25 responden atau 83%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%.

Maka rata-rata responden yang menjawab baik adalah 13 responden atau 43% dan rata-rata yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dan rata-rata yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%. Maka pada indikator proses responden yang dominan adalah 57% cukup baik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, menurut peneliti indikator proses sudah cukup baik karena petugas melaksanakan tugasnya sudah cukup optimal namun dibeberapa kesempatan atau kasus pelaksanaan tugasnya tidak efektif dan efisien kepada calon TKI karena proses yang terbilang sedikit tersendat walaupun sudah tergolong lancar.

### 3. Output

Indikator output atau hasil memfokuskan pada penilaian hasil atau produk.

**Tabel V.8 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Output (Dinas)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perlindungan Tenaga Kerja	5 83%	1 17%	0 0%	6
	Pembentukan Tenaga Kerja	5 83%	1 17%	0 0%	
Jumlah		10	2	0	12
Rata-rata		5	1	0	6
Persentase (%)		83%	17%	0%	100%

**Sumber: Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas data dilihat untuk indikator output pada item perlindungan tenaga kerja responden yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83%, cukup baik sebanyak 1 responden atau 17%, dan kurang baik 0 responden 0%. Sedangkan untuk item penilaian kedua yaitu pembentukan tenaga kerja responden yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83% cukup baik sebanyak 1 responden atau 17% dan kurang baik 0 responden atau 0%.

Maka rata-rata responden yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83%, kemudian rata-rata yang menjawab cukup baik dengan sebanyak 1 responden atau 17%, dan rata-rata yang menjawab kurang baik sebanyak 0

responden atau 0%. Maka hasil untuk indikator Output dari Dinas keseluruhan dominan adalah Baik.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, menurut peneliti perlindungan tenaga kerja termasuk pada cukup baik hampir tidak baik, hal ini di karena banyaknya kasus tentang TKI yang tidak betah ketika berada di lua negri yang di sebabkan oleh tindak kekerasan majikan pada tenaga kerja. Hal ini di benarkan oleh salah satu pegawai bagian Kasi Perlindungan Pemberdayaan oleh Bapak Bahrizal yang saya wawancarai beliau berkata :

*“Ada beberapa kasus tetapi tidak ter publish karena kasus tersebut sudah cepat tanggap di tangani oleh pihak kantor makanya beritanya tidak tersebar, untuk B3TKI sendiri memiliki standar perlindungan yang ketat terhadap tki baik itu dari segi hukum maupun keselamatan saksi/korban” (Wawancara dengan Kasi Perlindungan Pemberdayaan Bapak Bahrizal 23 November 2020).*

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa dugaan peneliti benar tentang adanya permasalahan tindak kekerasan majikan kepada tenaga kerja walaupun tidak seramai seperti yang diberitakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden calon TKI sebanyak 30 orang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.9 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Output (Calon Tenaga Kerja Indonesia)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perlindungan Tenaga Kerja	20 67%	10 33%	0 0%	30

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
2	Pembentukan Tenaga Kerja	19 63%	10 33%	1 4%	30
	Jumlah	39	20	1	60
	Rata-rata	19	10	1	30
	Persentase (%)	64%	33%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item perlindungan tenaga kerja yang menjawab baik sebanyak 20 responden atau 74%, dan menjawab cukup baik sebanyak 10 responden atau 33%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%. Pada item pembentukan tenaga kerja yang menjawab baik sebanyak 19 responden atau 63%, dan menjawab cukup baik sebanyak 10 responden 33%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%.

Maka rata-rata responden menjawab baik adalah 19 responden atau 64%, kemudian yang menjawab rata-rata cukup baik sebanyak 10 responden atau 33%, dan rata-rata yang menjawab kurang baik sebanyak 1 responden atau 3%. Maka hasil untuk indikator Output dari calon TKI keseluruhan dominan adalah Baik.

#### 4. Outcome

**Tabel V.10 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Outcome (Dinas)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penempatan TKI	6 1%	0 0%	0 0%	6
2	Dampak dari Pelaksanaan Tugas	5 83%	1 17%	0 0%	6
	Jumlah	11	1	0	12
	Rata-rata	5	1	0	6
	Persentase (%)	83%	67%	0%	100%

**Sumber: Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas data dilihat untuk indikator outcome pada item penempatan TK/CTKI responden yang menjawab baik sebanyak 6 responden atau 1%, cukup baik sebanyak 0 responden atau 0%, dan kurang baik 0 responden 0%. Sedangkan untuk item penilaian kedua yaitu dampak pelaksanaan tugas responden yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83% cukup baik sebanyak 1 responden atau 17% dan kurang baik 0 responden atau 0%.

Maka rata-rata responden yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 83%, kemudian rata-rata yang menjawab cukup baik dengan sebanyak 1

responden atau 17%, dan rata-rata yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%.

Hal ini di benarkan oleh salah satu pegawai bagian Kasi Penyiapan Penempatan oleh Bapak Hariadi Aluysius yang saya wawancarai beliau berkata :

*“Dimana penempatan TKI bisa dikatakan dengan baik, karena setiap melakukan kegiatan untuk menempatkan TKI, kantor balai terlebih dahulu memperhatikan prosedur-prosedur yang diterapkan, persyaratan yang telah diserahkan, agar pelaksanaan penempatan berjalan dengan benar dan sesuai aturan. Dan dampak dari pelaksanaan tugas bisa dikatakan baik, karena dari sisi postibe nya pelaksanaan tugas itu berjalan sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada.”(Wawancara dengan Kasi Penyiapan Penempatan Bapak Hariandi Aluysius, 23 November 2020).*

**Tabel V.11 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Outcome (Calon Tenaga Kerja Indonesia)**

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penempatan TKI	15 30%	15 30%	0 0%	30
2	Dampak dari Pelaksanaan Tugas	10 33%	19 63%	1 4%	30
Jumlah		26	34	1	60
Rata-rata		12	17	1	30
Persentase (%)		40%	57%	3%	100%

**Sumber: Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas dapat dilihat pada item penempatan TKI yang menjawab baik sebanyak 15 responden atau 30%, dan menjawab cukup baik

sebanyak 15 responden atau 30%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%. Pada item dampak pelaksanaan tugas yang menjawab baik sebanyak 10 responden atau 33%, dan menjawab cukup baik sebanyak 19 responden 63%, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 responden atau 0%.

Maka rata-rata responden menjawab baik adalah 12 responden atau 40%, kemudian yang menjawab rata-rata cukup baik sebanyak 17 responden atau 57%, dan rata-rata yang menjawab kurang baik sebanyak 1 responden atau 3%.

Maka hasil untuk indikator Outcome dari calon TKI keseluruhan dominan adalah Baik.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Pekanbaru**

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

1. Hambatan pertama yang peneliti temui adalah masalah pada sarana dan prasarana dimana beberapa komputer dan peralatan pendukung seperti kursi ruang tunggu ada yang rusak sehingga menghambat kelangsungan kegiatan di kantor BP3TKI, masalah pada indikator input juga ada pada masa

pelatihan tenaga kerja dimana masalah yang timbul berupa kekurangan alat praktek dan alat pendukung lainnya.

2. Hambatan kedua yang peneliti temui adalah keefektifan dan keefisienan BP3TKI dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan tugas dimana ini terkait dengan kebijakan dari kantor balai mengenai pelaksanaan tugas yang tepat sasaran dan kecepatan proses kegiatan agar tidak berbelit-belit, berdasarkan kuosioner yang penulis sebarakan sebagian besar menuliskan cukup efektif namun tidak optimal dimana di dalam nya terdapat penjelasan yaitu pelaksanaan tugas BP3TKI sudah cukup tepat sasaran namun belum sepenuhnya efektif dimana masih timbul permasalahan terkait persoalan informasi pembukaan pendaftaran CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) yang belum menyeluruh atau informasi yang tidak sampai ke masyarakat membutuhkan tidak terbuka untuk umum (informasi masih sulit di akses) mengenai keefisienan pelaksanaan tugas BP3TKI terkendala di pendataan yang bisa memakan proses waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan hingga hari keberangkatan pasca pelatihan.
3. Hambatan ketiga dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan dan pembentukan tenaga kerja Indonesia, masalah atau hambatan yang timbul dalam hal ini adalah kekhawatiran tenaga kerja akan perlindungan yang di sediakan BP3TKI dimana para calon TKI merasa belum sepenuhnya diberi perlindungan secara langsung padahal sudah di beri jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan dan undang-undang, kemudian permasalahan atau hambatan yang terjadi pada pembentukan atau pelatihan tenaga kerja berasal

dari pihak dinas dimana pembentukan tenaga kerja yang memakan waktu yang seharusnya dapat di berangkat kan lebih cepat namun jadi terhambat hal ini di sebabkan kurang nya tenaga pengajar ahli dari pihak balai dimana tenaga pengajar ahli dominan diisi oleh pegawai ahli yang sudah berusia lebih dari 50thn menuju masa pensiunnya sedangkan tenaga kerja yang harus di beri pelatihan bisa melebihi kapasitas yang seharusnya.

4. Hambatan keempat yang terjadi adalah mengenai penempatan TKI yang sesuai dan dampak dari pelaksanaan tugas BP3TKI dalam hal ini penulis hanya sedikit menemukan hambatan pada penempatan tenaga kerja dimana tenaga kerja yang di tunjuk tempat kerjanya sudah sesuai dengan kemampuannya namun penghasilan yang di terima tidak sesuai hal ini terjadi diluar kemampuan dinas yaitu kurs mata uang rupiah yang berubah-ubah, kemudian dampak dari pelaksanaan tugas BP3TKI dalam hal ini dampak yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan tugas BP3TKI adalah mayoritas jawaban responden adalah positif karena dengan adanya kegiatan BP3TKI ini pengangguran di Indonesia berkurang dengan mendaftarkan diri ke BP3TKI untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI dan hal ini juga berdampak baik pada pemasukan visa negara dan kerjasama negara antara Indonesia dengan negara pengguna jasa TKI.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa :

1. Untuk indikator Input dengan item penilaian Ketersediaan sumber daya serta sarana dan prasarana sesuai dengan standar dan ketetapan, maka di peroleh jawaban dari responden pegawai dan calon tenaga kerja indonesia adalah “Baik”.
2. Untuk indikator Proses dengan item penilaian Efektivitas pelaksanaan tugas BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan Efisiensi pelaksanaan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), maka di peroleh jawaban dari responden pegawai dan calon tenaga kerja indonesia adalah “Baik”.
3. Untuk indikator Output dengan item penilaian Tenaga kerja terlindungi dan Tenaga kerja yang handal, maka diperoleh jawaban dari responden pegawai dan calon tenaga kerja indonesia adalah “Baik”.
4. Untuk indikator Outcome dengan item Penempatan TKI sesuai dengan ketentuan dan Dampak dari pelaksanaan tugas BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), maka jawaban pegawai dan calon tenaga kerja indonesia adalah “Baik”.

Dari keseluruhan kesimpulan indikator dapat dilihat jawaban dari responden pegawai dan jawaban responden calon tenaga kerja indonesia

semuanya sama yaitu baik, dengan demikian sudah dipastikan pelaksanaan tugas BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) tergolong baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan pelayanan pegawai BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dalam , penempatannya serta perlindungan tenaga kerja indonesia yang masih kurang maksimal sehingga menimbulkan beberapa kesulitan bagi calon tenaga kerja indonesia maupun pihak dalam balainya sendiri. Hal ini mungkin dapat di sebabkan oleh beberapa faktor entah itu dari pihak balai maupun calon tenaga kerjanya sendiri.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Melihat dari persoalan tenaga kerja indonesia yang sudah berlarut-larut lamanya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus serius mencari tau dimana letak kesalahan dan solusi untuk mengatasi nya. Karena biar bagaimanapun tenaga kerja indonesia adalah salah satu sumber pendapatan visa negara yang besar dan digunakan untuk pemasukan kas negara.
2. Segala tupoksi yang melekat pada dinas terkhusus pegawai yang bertanggung jawab penuh atas tugas balai terhadap CTKI dan TKI, dimana pegawai harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan tenaga kerja agar menghasilkan tenaga kerja yang bagus dan handal untuk di berangkatkan ke luar negri.

3. Pihak balai harus lebih memperhatikan peralatan kantor agar kegiatan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) tidak terhambat dan tertunda, hal ini bisa terlaksana bila pihak kantor mengganti atau memperbaiki peralatan administrasi terutama peralatan yang terkait dengan pendataan CTKI dan TKI.
4. Mengenai pelatihan dan pembentukan tenaga kerja pihak balai harus mengganti pelatihan atau tenaga ahli untuk memberikan pelatihan keterampilan, hal ini sangat perlu untuk menghasilkan tenaga kerja yang handal, agar hasil tenaga kerja Indonesia yang di berangkatkan bisa bersaing dengan tenaga kerja luar.
5. Mengenai penyebaran informasi untuk pendaftaran tenaga kerja seharusnya pihak balai memberikan informasi secara merata dan terbuka agar bisa memberikan kesempatan kepada para calon tenaga kerja, ini bisa di lakukan melalui penyebaran informasi lewat surat kabar, web resmi BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan media social.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, W.S, Sakrim Miharja & Yeni Dewiyanti L. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Wilayah Bandung. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* .Vol. 11, No. 1.
- Arikunto, Suharsini dan Safruddin, Cepi.(2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh.(2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Undip Press.
- Febriyanto, T. & Rohman, A.T. (2018). Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja di Luar Negeri. *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, hlm. 139-154.
- Fruchey (1973). *Evaluation What it is. Dalam Evaluation in Extension*.United State Departement of Agriculture.
- Hamim, Sufian H. (2014). *Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru : UIR Press.
- Hikmah R.L, Evi Sukmayeti & Vidya Yanti U. (2020). Peran Konsultasi BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dilema Birokrasi Dalam Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Manajemen*. Vol. 6, No. 2, Hlm 216-226.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin (2016). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*.Malang-Jatim.
- Janice, Astrella. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No.3. Hlm 1460-1471.
- Jumaah, Siti Hidayatul, Rachmawati Hussein. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di KabupatenLombok Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 7, No. 3,267-286.
- Kristina, Anita. (2017). Pola Koordinasi Dan Kinerja Kebijakan Perlindungan TKI : Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Indonesia Yang Berasal Dari Jawa Timur. Universitas Trunojoyo Madura.

- Maksudi, Beddy Irawan. (2017). *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok : PT. Raja Grafindo.
- Mayesti, Raisa. (2013). Implementasi Pembinaan, Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak. *Publika*. Vol.2, No.2.
- Meilasari, Dwi Rahayu, Rizka Nur Amalia H. L. (2013). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Brebes. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 1689–1699.
- Nasikun. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Parjiyana. (2012). *Logika dan Filsafat Ilmu*. Pekanbaru : Alfa Riau.
- Putri, M. R., Purnaweni, H., & Soedjono. (2019). Implementasi Kebijakan Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Transparansi* , Vol.2, No.1, 84-96.
- Prakerti, Galeh, Herbasuki S. & AUFARUL MAROM. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan Di Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol. 4, No. 4.
- Sawitri. S. 2007. *Evaluasi Program Pelatihan Ketrampilan Membuat Hiasan Busana dengan Teknik Pemasangan Payet Bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunungpati Semarang*. Yogyakarta: PPs UNY.
- Shafira,Tya. (2020). Kinerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pekanbaru. *Jom Fisip*. Vol. 7: Edisi II.
- Siagaian, Sondang P. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta
- Suciningati, Dyah Harini & Hesti Lestari. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol 2. No. 2.
- Suhartoyo. (2019). Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2. No. 3.
- Sugiono (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Terry, Gr. (1980). *Motivasi dan Organisasi Perkantoran*. Jakarta.

Yuliartini, N.P.R & Dewa Gede S.M. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol.8 No.2.

Yussa Tarmizi dan Andry Hendry, 2015. *Perilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru.

Zulkifli (2009). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru.

**Dokumen :**

Buku pedoman penulis usulan penelitian, skripsi, dan kertas kerja mahasiswa, 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Instruksi Presiden R.I. Nomor : 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 11/KA/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.035/KA/VIII/2007.

Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.09/KA/II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI.

Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : Per.47/KA/ XII/2008, tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Balai dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.

Surat Keputusan Kepala BP3TKI Nomor : Kep. 77 / BP3TKI-3 / II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan BNP2TKI Tahun 2018.